**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PENDEKATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014 DI DESA ULUWAE**

Desi Rahmiyanti

Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Kupang

Email : desirahmianti@gmail.com

Yustina Nofiane Bhubhu

Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Kupang

ABSTRACT

The objectives of this study are to determine: 1) The planning of financial management in Uluwae II Village in accordance with village financial management planning as per Ministry of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014; 2) The implementation of financial management in Uluwae II Village in accordance with village financial management implementation as per Ministry of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014; 3) The administration of financial management in Uluwae II Village in accordance with village financial management administration as per Ministry of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014; 4) The reporting of financial management in Uluwae II Village in accordance with village financial management reporting as per Ministry of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014; and 5) The accountability of financial management in Uluwae II Village in accordance with village financial management accountability as per Ministry of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014. This research is a Descriptive Qualitative study. The sources of data used in this research are Primary and Secondary Data. For Primary Data, the researcher conducted direct interviews to obtain valid data sources, while Secondary Data was taken from documents related to the procedures for implementing Village Financial Management from planning to accountability stages. The subjects of this research are the Head of Uluwae II Village, the Village Secretary and Staff, and the community of Uluwae II Village. Data collection techniques used in this study include Observation, Interviews, and Documentation. The data analysis techniques employed are Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing (verification). The results of the study indicate that Uluwae II Village has carried out financial management processes in accordance with the provisions stipulated in Ministry of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014. Despite some discrepancies and delays in reporting and accountability, overall the village has endeavored to comply with the applicable regulations. Community participation in village development planning demonstrates a commitment to achieving participatory and transparent planning. The village's financial administration is quite good with the assistance of the Village Financial System (SISKEUDES), but there is still a need for improvement in the collection of supporting documents and the preparation of accountability reports. Therefore, improvements are needed in the process of collecting supporting documents and preparing accountability reports to enhance compliance and transparency in village financial management.

Keywords: Village, Village Financial Management, Ministry of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintah sentralisasi menjadi bentuk pemerintahan desentralisasi membawa perubahan strategi baru terhadap otoritas pemerintah daerah. Sistem pemerintahan sentralisasi merupakan sebuah sistem pemerintah pusat yang terpusat untuk menentukan arah pembangunan negara (Sulistyowati, 2020). Penerapan sistem sentralisasi dianggap tidak efisien karena pembangunan menjadi kurang merata antara pembangunan di perkotaan dengan pembangunan yang berada di pedesaan (Wibowo, 2019). Sedangkan sistem pemerintahan desentralisasi merupakan sistem yang

wewenangnya diberikan pada pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan serta meningkatkan fungsi layanan pemerintah kepada masyarakat.

Disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014 membuat pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan di dalam desa pemasukan dan pengeluaran wajib jelas, karena itu akan menentukan nasib desa tersebut kedepan. Penggunaan uang yang sewenang-wenang tentu akan memberi akibat buruk. Oleh sebab itu, untuk mengatur penggunaan uang diperlukan perencanaan keuangan yang baik. Desa memiliki beberapa sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Bantuan dana yang diterima kemudian disebut dengan dana desa, yaitu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan sebagai desa yang diutamakan untuk proses kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya bantuan dana desa pemerintahan desa diharapkan bisa mengoptimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, serta ekonomi desa. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada prinsipnya adalah rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama Badan Pengurus Desa (BPD) yang dituangkan dalam 5 peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati.

Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa yang direalisasikan sebesar Rp7.490.000,00, Pendapatan Transfer yang terealisasi sebesar Rp1.025.121.806,00, termasuk Dana Desa yang terealisasi sesuai anggaran. Selain itu, terdapat Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Alokasi Dana Desa yang terealisasi sebagian. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan pada Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah antara anggaran dan realisasi. Jumlah pendapatan Desa secara keseluruhan tercatat sebesar Rp1.037.480.231,98. Sementara itu, pada sisi belanja, terdapat beberapa bidang pengeluaran seperti Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa. Meskipun ada peningkatan realisasi belanja pada beberapa bidang, terdapat juga perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi belanja Desa secara keseluruhan, dengan total belanja yang terealisasi mencapai Rp1.027.980.656,00. Dari perbandingan tersebut, terdapat surplus keuangan sebesar Rp9.499.575,98 meskipun secara anggaran seharusnya terdapat defisit. Hal ini tercapai melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp84.229.400,00, yang menghasilkan surplus atau kelebihan penerimaan pembiayaan netto. Namun, pada akhirnya, terdapat saldo lebih anggaran (SILPA) pada tahun berjalan sebesar Rp93.728.975,98 yang akan dialokasikan untuk periode berikutnya.

Dari hasil wawancara dan data pendukung yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan yang dilakukan secara bertahap telah mengintegrasikan

prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi, dengan melibatkan aktif unsur masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Hasil dari proses tersebut adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Uluwae II untuk periode 2023.

Anggaran Dana Desa Uluwae II yang telah terealisasi, terlihat bahwa adanya naik turun capaian *output* dalam pelaporan keuangan desa dan sisa anggaran terbilang cukup besar, maka anggaran tersebut pastinya memerlukan pengelolaan keuangan yang baik supaya dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana. Pengelolaan dana desa dilaksanakan sekretaris desa dengan dibantu perangkat desa dan disetujui oleh kepala desa. Sebagai bentuk transparansi pemerintah desa menunjukkan laporan keuangan desa menggunakan media internet serta papan informasi di balai desa.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat replikasi dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Mariet K. Goo (2021) yang membahas tentang Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2018-2020). Perbedaannya terletak pada rujukan atau landasan hukum, tahun penelitian dan objek penelitian. Dimana penelitian sebelumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tahun penelitian sebelumnya yaitu 2021 dan objek penelitian sebelumnya yaitu di Desa Aeramo. Sedangkan penelitian saat ini yaitu berlandaskan hukum Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tahun penelitian saat ini yaitu pada periode 2020-2023 dan objek penelitian saat ini adalah Desa Uluwae II.

Penelitian ini dilakukan di Desa Uluwae II Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada. Desa Uluwae II telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, akan tetapi belum optimal baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan tersebut. Hal ini terlihat dari hasil observasi awal penulis bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa. Kemudian terkait keuangan Desa, Desa ini belum terlihat secara transparan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa. Desa Uluwae belum menyajikan laporan secara tertulis kepada masyarakat dan melalui media informasi yang dengan mudah diakses. Dengan adanya penelitian ini, mampu menyesuaikan pengelolaan keuangan desa dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) menerangkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia (Wibowo, 2020). Sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah desa difungsikan untuk mendanai setiap kegiatan yang berkaitan dengan progres desa. Setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengatur dan mengelola keuangannya (Laely, 2021; Purnomo et al., 2021).

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem NKRI (PP, 2014). Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa. (Widjaja, 2003).

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 06 1Tahun 2014., Pasal I (Ayat 10), menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Sementara itu, menurut M. Manullang yang dikutip oleh Ibnu Syamsi dalam bukunya yang berjudul "Dasar-clasar Kebijaksanaan Keuangan Negara" menjelaskan uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran pembelian barang-burang, jasa-jasa, juga bagi kekayaan berharga lainnya dan bagian pembayaran utang. Keuangan adalah sesuatu yang berupa kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang (Mamesa, 2019).

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 BAB II Pasal 2 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, juga mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dimana 5 kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

Indikator Pengukuran pengelolaan Keuangan Desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Keterangan	Indikator
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. 2. Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun. 3. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa.
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota. 2. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. 3. Kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. 2. Penatausahaan oleh Kaur Keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. 3. Pencatatan pada penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”. 2. “Laporan APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan”. 3. “Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi

	pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan”.
Pertanggungjawabana	<ol style="list-style-type: none">1. “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran”.2. “Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”.3. “Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa”.

Sumber: *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Uluwae II, Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. Waktu penelitian selama 1 bulan yaitu pada bulan April tahun 2024.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Uluwae II. Subyek penelitian ini adalah Kepala Desa dan Sekertaris Desa Uluwae II.

Menurut Sugiyono (2019), Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan dapat memberikan jawaban. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa dan sekertaris desa Desa Uluwae II.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan otentik atau dokumen asli yang dapat dijadikan bukti dalam suatu penelitian dan bahkan dalam persoalan hukum. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono, 2019).

Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti mengelompokkan data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/*verifikasi*

Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan dan mengangkatnya sebagai temuan yang baru dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci melalui reduksi data. Reduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah mendisplay data (penyajian data) agar data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami dan setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 BAB II Pasal 2 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, juga mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dimana 5 kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berikut Pengelolaan Keuangan Desa Uluwae II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1. Perencanaan

Hasil pembahasan ini menjawab rumusan masalah pertama pada tahap proses perencanaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan keuangan desa dimulai dengan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk disampaikan kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Hasil akhir dari proses perencanaan ini merupakan APBDesa yang telah disepakati bersama dengan

BPD dan disahkan oleh Bupati.

Musrenbang dan Musdes merupakan tahap awal dalam proses perencanaan desa, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti RT, RW, PKK, dan tokoh agama. Musrenbang diadakan pada bulan Juni-Juli, diikuti oleh Musdes pada bulan Agustus. Proses ini menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, yang berfungsi untuk menyaring aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Hal ini sesuai kutipan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Kaur Perencanaan, Kepala Dusun dan Kepala Desa:

"....Pertama-tama, dari Musdus kita mulai dengan mendengarkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah di tingkat dusun. Kemudian, aspirasi itu akan dijadikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melalui musyawarah desa (Musdes), dan akhirnya disusun menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Secara resmi, Musdus dilakukan pada bulan Juni-Juli, sementara Musdes biasanya di bulan Agustus, dan penyusunan RAPBDes dilakukan sekitar bulan September-Oktober."

(Ibu Fransiska Bupu, Kaur Perencanaan 22 April 2024)

".....Pertama-tama, kita memulai dengan Musdusun di mana desa memberikan arahan untuk mengadakan musyawarah di setiap dusun. Kemudian, dari setiap dusun, aspirasi tersebut dirangkum dan disaring untuk keperluan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Setelah itu, hasil rangkuman tersebut dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes) untuk dibahas, dipertimbangkan, dan disahkan."

(Ibu Imakulata Moi, Kepala Dusun Watunggo, 22 April 2024)

"... Ya Pasti nya Masyarakat, Kepala Dusun, BPD, RT, RW, dan PKK serta Aparat Desa".

(Bapak Mikael Mite, Kepala Desa, 22 April 2024)

Pasal 20 Ayat (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Di Desa Uluwae II, RAPBDesa diserahkan kepada Kepala Desa pada awal bulan Oktober, meskipun terdapat kemungkinan perubahan jika ada peraturan baru di tengah proses. Hal ini sesuai pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Kepala Desa Uluwae II:

".....iya...Sekretris Desa menyampaikan Paling lambat Oktober, kecuali jika ada peraturan baru di tengah-tengah. Misalnya, jika ada Peraturan Bupati (Perbub) atau peraturan lainnya yang muncul pada bulan Oktober, maka akan ada perubahan. Namun, apapun hasilnya, pada awal Oktober, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sudah diserahkan kepada Kades."

(Bapak Mikael Mite, Kepala Desa, 23 April 2024)

Pasal 20 Ayat (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Proses ini dilaksanakan di Desa Uluwae II, dengan RAPBDesa disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini sesuai pernyataan narasumber:

Berikut kutipan wawancara bersama Ketua BPD dan Bendahara Desa Uluwae II:

"Iya...(Kepala Desa telah menyampaikan RAPBDes kepada BPD)"

(Bapak Romanus Ria, Ketua BPD, 23 April 2024, PR6, Baris ke 38)

"Iya, ini kan APBDes disepakati bersama dengan BPD untuk pengesahan, apabila BPD sudah setuju dengan RAPBDes tinggal pengesahan, yang disebut pengesahan seperti yang disini Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, ini kalau secara aturankan di bulan Desember itu sudah harus pengesahan antara Pemerintah Desa dan BPD...."

(Bapak Ferdinandus Ria, Bendahara Desa, 23 April 2024)

Pasal 20 Ayat (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Desa Uluwae II mengalami keterlambatan dalam penetapan RAPBDesa hingga Januari 2024 karena penentuan Pagu Dana yang terlambat. Hal ini sesuai pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Bendahara Desa dan Sekretaris Desa Uluwae II:

"....Iya, ini kan APBDes disepakati bersama dengan BPD untuk pengesahan, apabila BPD sudah setuju dengan RAPBDes tinggal pengesahan, yang disebut pengesahan seperti yang disini Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, ini kalau secara aturankan di bulan Desember itu sudah harus pengesahan antara Pemerintah Desa dan BPD. Anggaran di 2023 itu kita ada keterlambatan terkait Pagu dana, itu kita sahkan di bulan Januari 2024."

(Bapak Ferdinandus Ria, Bendahara Desa, 23 April 2024)

"....Kemarin ada peraturan dari empat menteri dan juga Perbub mengenai penempatan pos-pos anggaran. Jadi itu yang menghambat kami, RAPBDes sudah selesai nanti dirubah lagi."

(Bapak Agustinus Riwa, Sekretaris Desa 23 April 2024)

Pasal 21 Ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi dalam satu sampai dua hari setelah disepakati. Proses ini di Desa Uluwae II dilakukan sesuai peraturan, dengan penyampaian dilakukan segera setelah pengesahan. Hal ini sesuai pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Bendahara Desa:

“.....Iya, ini disampaikan melalui Camat setelah kita sahkan seperti yang tadi, kita sahkan di bulan Januari satu sampai dua hari kita sampaikan ke kecamatan. Kecamatan evaluasi itu kurun waktunya saya agak lupa, kurang lebih ya sekitar satu minggu hari kerja untuk dievaluasi Camat sebelum disampaikan ke Bupati.”

(Bapak Ferdinandus Ria, Bendahara Desa, 23 April 2024)

Pasal 21 Ayat (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Di Desa Uluwae II, hasil evaluasi ditetapkan dalam waktu kurang lebih satu minggu kerja. Hal ini sesuai pernyataan Narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Kepala Desa Uluwae II:

“...Ya, Jadi Camat harus melakukan evaluasi atas nama Bupati karena sebagian kewenangan Bupati itu telah diberikan kepada Camat selaku staf Bupati yang ada di wilayah. Kecamatan evaluasi itu, kurun waktunya saya agak lupa, kurang lebih ya sekitar satu minggu hari kerja”.

Pasal 21 Ayat (3) Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Desa Uluwae II juga menerapkan ketentuan ini. Hal ini sesuai pernyataan Narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Kepala Desa Uluwae II:

“...Iya, seperti itu... (Perdes berlaku dengan sendirinya).

(Bapak Mikael Mite, Kepala Desa, 23 April 2024)

Pasal 21 Ayat (4) Jika hasil evaluasi Bupati/Walikota menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai, Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan dalam waktu paling lama 7 hari kerja. Desa Uluwae II melaksanakan ketentuan ini sesuai peraturan. Hal ini sesuai pernyataan Narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Kepala Desa Uluwae II:

“...ya, itu Sampai berakhirnya tahun anggaran, kan Januari sudah mulai tahun berikutnya”.

(Bapak Mikael Mite, Kepala Desa, 23 April 2024)

Secara umum, proses penyusunan dan penetapan APBDesa di Desa Uluwae II telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, meskipun terdapat beberapa keterlambatan terkait penentuan Pagu Dana dan perubahan regulasi. Proses musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat dan berbagai elemen desa menunjukkan komitmen desa dalam mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan transparan.

2. Pelaksanaan

Pada Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Uluwae, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Terkait dengan Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi, terdapat

ketidaksesuaian pelaksanaan di Desa Uluwae II karena pendapatan langsung dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tetap disetor secara tunai ke Bendahara Desa. Hal ini sesuai pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Kepala Dusun Watunggo Desa Uluwae II:

“...Untuk pendapatan asli desa, pendapatan transfer ada Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil retribusi, Bagi hasil pajak, ...”

(Bapak Agustinus Riwa, Sekretaris Desa, 24 April 2024)

“Langsung menyetor tunai untuk PAD, misalnya hasil BUMDES berupa jualan hasil kelompok tani.”

(Ibu Imakulata, Kepala dusun, 23 April 2024)

Selanjutnya, terkait dengan pasal 24 ayat (2), pelaksanaan di Desa Uluwae II sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku karena Desa Uluwae II telah memiliki rekening, dan jika belum memiliki layanan perbankan, hal ini diatur oleh Peraturan Bupati (Perbub). Hal ini sesuai pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Kepala Desa Uluwae II:

“.....Kalo APBDes ya pasti, karena kita sudah punya rekening. Jika belum ya sesuai Perbub.”

(Bapak Mikael, Kepala Desa, 24 April 2024)

Kemudian, terkait dengan pasal 24 ayat (3), pelaksanaan di Desa Uluwae II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa didokumentasikan dengan bukti yang lengkap dan sah. Hal ini sesuai pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Sekretaris Desa:

“Iya, jelas ini setiap pengeluaran dan penerimaan harus ada buktinya.”

(Bapak Agustinus, Sekretaris Desa, 24 April 2024)

Selanjutnya, terkait dengan pasal 26 ayat (3), pelaksanaan di Desa Uluwae II telah sesuai dengan ketentuan yang ada karena telah mengatur pos untuk biaya tak terduga dalam Peraturan Desa (Perdes). Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Bendahara Desa:

“.....Ini memang di Perdes memang ada pos untuk biaya tak terduga, dalam penggunaan harus ada RAB yang disahkan pak Kades.”

(Bapak Ferdinandus Ria, Bendahara Desa, 25 April 2024)

Pada pasal 27 ayat (1), pelaksanaan di Desa Uluwae II sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku karena pelaksana kegiatan wajib melampirkan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) saat mengajukan pendanaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Sekretaris Desa Uluwae II:

“Iya, dia harus melampirkan RAB (Rencana Anggaran Biaya).”

(Bapak Agustinus Riwa, Sekretaris Desa, 25 April 2024)

Secara umum pada proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Uluwae II, bahwa meskipun terdapat beberapa pelanggaran terhadap ketentuan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, namun secara keseluruhan pelaksanaan keuangan di Desa Uluwae II telah berusaha untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan memiliki mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa tersebut.

3. Penatausahaan

Pada proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Desa Uluwae II, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus dicatat dan ditutup buku setiap akhir bulan. Kutipan wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa bendahara desa bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran desa serta melakukan tutup buku pada akhir bulan. Hal ini sesuai pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Bendahara Desa Uluwae II:

“.....Ya, yang pasti bendahara. Ia harus mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa serta melakukan tutup buku pada akhir bulan”.

(Bapak Agustinus, Sekretaris Desa, 25 April 2024)

Pada proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Desa Uluwae II sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang menyatakan bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan dalam waktu maksimal 10 hari setelah akhir bulan. Hal ini sesuai pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Bendahara Desa Uluwae II:

“....Saya yang wajib melaporkan untuk pertanggungjawaban keuangan ke Kepala Desa setiap bulan maksimal 10 hari setelah akhir bulan”.

(Bapak Ferdinandus, Bendahara Desa, 25 April 2024)

Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Desa Uluwae II telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Berdasarkan pernyataan narasumber, Bapak Ferdinandus, Bendahara Desa Uluwae II, secara rutin melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa setiap bulan, dengan batas waktu maksimal 10 hari setelah akhir bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Uluwae II menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Desa Uluwae II, sejalan

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang mengatur mengenai pencatatan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Hal ini sesuai pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Bendahara Desa:

“.....Ya, Penatausahaannya setiap bulan, mencatat masuk keluarnya keuangan. Tiap bulannya laporan ke kepala desa. Untung, di desa ini termasuk tertib, PTPKD lapornya tertib. Jadi, penatausahaan terbantu, ikut tertib, pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu saya juga terbantu adanya SISKEUDES...”

(Bapak Ferdinandus, Bendahara Desa, 25 April 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Uluwae II memiliki mekanisme yang terstruktur untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dengan demikian, penatausahaan keuangan Desa Uluwae II telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, berdasarkan analisis terhadap pasal-pasal yang relevan serta kutipan wawancara dengan narasumber.

2. Pelaporan

Hasil pembahasan ini menjawab rumusan masalah keempat pada tahap Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, proses pelaporan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyajikan data dan informasi mengenai suatu kegiatan dalam periode tertentu. Bentuk pelaporan pada kegiatan pengelolaan keuangan desa yakni Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pada proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan di Desa Uluwae II, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) hingga (3) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 telah dipatuhi dengan baik. Kepala Desa secara rutin menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati. Laporan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu laporan untuk semester pertama dan laporan untuk semester akhir tahun. Hal ini sesuai pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Kepala Desa dan Bendahara Desa Uluwae II:

“Laporan realisasi APBDes ya ke Bupati.”

(Bapak Mikael, Kepala Desa, 24 April 2024,)

“Yang jelas tadi laporan APBDes ada laporan semesteran dan laporan tahunan.”

(Bapak Ferdinandus, Bendahara Desa, 25 April 2024)

“.....Untuk laporan realisasi APBDes semesteran tadi paling lambat akhir Juli...”

(Bapak Ferdinandus, Bendahara Desa, 27 April 2024)

Proses pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Uluwae II telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kepala Desa secara teratur menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati. Pelaporan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu laporan untuk semester pertama dan laporan untuk semester akhir tahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber, baik Kepala Desa maupun Bendahara Desa. Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli, sementara laporan semester akhir tahun dilaporkan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dengan demikian, Desa Uluwae II telah mematuhi ketentuan regulasi terkait pelaporan keuangan desa dengan baik dan konsisten.

Namun, terdapat ketidaksesuaian terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan semester akhir di Desa Uluwae II, yang seharusnya disampaikan pada bulan Januari sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (4). Bahwa pelaporan tersebut baru dilakukan pada bulan Maret tahun 2024, menunjukkan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan. Hal ini menandakan bahwa meskipun sebagian besar ketentuan terpenuhi, masih ada ruang untuk peningkatan dalam memastikan semua laporan disampaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Bendahara Desa Uluwae II:

“...Laporan tahunan berupa pertanggungjawaban APBDes maksimal akhir Januari, tapi untuk yang kemarin baru di bulan Maret tahun 2024”

(Bapak Ferdinandus Ria, Bendahara Desa, 27 April 2024)

Pada konteks ini, penting bagi Desa Uluwae II untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan, khususnya terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban semester akhir. Hal ini akan memastikan bahwa desa memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, perbaikan dalam proses pelaporan akan mendukung upaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan efisien di tingkat desa.

3. Pertanggungjawaban

Pada proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan di Desa Uluwae II, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1). Proses ini dilakukan secara rutin pada akhir setiap tahun anggaran, setelah dilakukan pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini berdasarkan Pernyataan dari narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Sekretaris dan Kepala Desa Uluwae II:

“Kalau pertanggungjawabannya sendiri dilaporkan ke Bupati setelah selesai tahun anggaran, sebelumnya laporan tersebut disidangkan dengan BPD untuk ditepakan menjadi Perdes.”

(Bapak Agustinus Riwa, Sekretaris Desa, 24 April 2024)

“Pemerintah desa menyusun LPJ, disampaikan kepada BPD lewat sidang paripurna untuk pembahasan LPJ nanti hasilnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat.”

(Bapak Mikael, Kepala Desa, 24 April 2024)

Pada Proses ini menunjukkan bahwa proses penyusunan dan pembahasan laporan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang, dimulai dari penyusunan LPJ yang kemudian dibahas dalam sidang bersama BPD.

Namun, terdapat ketidaksesuaian Petanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Uluwae II dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Hal ini disebabkan oleh kurang lengkapnya dokumen pendukung yang diperlukan dalam laporan pertanggungjawaban, seperti bukti-bukti dalam lampiran LPJ. Kemudian penyampaian pertanggungjawaban terjadi pada bulan Maret tahun 2024. Hal ini berdasarkan pernyataan Narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Bendahara dan Sekretaris Desa Uluwae II:

“...Ini di bulan Maret 2024. Kita terlambat karena pelaksana kegiatan kurang lengkap dalam peng-LPJ-an. Contohnya ada salah satu kegiatan yang kurang bukti dalam lampiran.”

(Bapak Ferdinandus, Bendahara Desa, 25 April 2024)

“Laporan akhir tahun kita baru lapor ke Bupati di bulan Maret, ada kedala dalam LPJ dari pelaksana.”

(Bapak Agustinus Riwa, Sekretaris Desa, 4 April 2024)

Pada proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Uluwae II berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, (2) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Hal ini sudah sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Uluwae II. Dimana laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDESA diinformasikan kepada masyarakat lewat papan pemberitahuan APBDES berupa baliho. Ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hal ini disampaikan melalui pernyataan narasumber.

Berikut kutipan wawancara bersama Bendahara Desa Uluwae II:

"...ya...Kami juga berkomitmen menyampaikan pertanggungjawaban kepada desa dan masyarakat melalui papan baliho, yang menjelaskan penggunaan keuangan desa."

(Bapak Ferdinandus Ria, Bendahara Desa, 25 April 2024)

Hasil pembahasan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Uluwae II sejalan dengan Penelitian sebelumnya oleh Delia (2021) tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lobu Rampah memberikan pemahaman yang relevan untuk pembahasan hasil penelitian tentang pelaporan pertanggungjawaban keuangan di Desa Uluwae II. Dalam penelitian Delia (2021), ditemukan bahwa meskipun Pemerintah Nagari Kudu Gantiang sudah memenuhi prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, namun masih terdapat kendala dalam tahap pelaksanaan, terutama terkait dengan keterlambatan pelaporan akhir realisasi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian tentang Desa Uluwae II, di mana terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban ke Bupati.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap implementasi tahap-tahap Pengelolaan Keuangan di Desa Uluwae II, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses perencanaan keuangan Desa Uluwae II telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Pada tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Uluwae II, terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014.
3. Proses penatausahaan keuangan Desa Uluwae II telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
4. Proses pelaporan keuangan Desa Uluwae II secara umum mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
5. Proses pertanggungjawaban keuangan Desa Uluwae II telah dianalisis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja., *Pemerintahan Desa Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003)
- Asoka Rano., 2018 *4 Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa "*. Jurnal JEMASI. Vol. 14, No. 1
- Aris, M. Syaiful., *UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, dalam Didik Sukirno., Otonomi Desa & Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Transisi edisi No.9/2014. Hlm.31
- Afandi Dhullo., Jantje J. Tinangon., Hadi Prabowo Gimon., 2018. *"Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 13, No. 2: 1-10

- Bagir, Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). Hlm. 165.
- Darmawan, A. (2019). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pada Desa Sumber Melati Diski*, Universitas Pembangunan Panca Abadi. Diakses dari <https://jurnal.pancabudi.ac.id/>
- Delila, (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lobu Rampah*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15419>
- Didik, Sukriono., (2014). *Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Transisi edisi No.9/2014, hlm.11
- Herni Sunarya dan Fauziyah Lamaya, 2017. “*Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo-NTT*”, Jurnal Akuntansi (JA) Vol. 4, No. 3, September 2017 Hal. 13 s/d 18. Diakses tanggal 6 Januari 2024 dari <https://ejournal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/150>
- Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti., *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2013 Vol.1, No. 5, Hlm.3
- KBBI, *Desa* diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desa> pada tanggal 6 Januari 2024.
- Mansyur, Achmad. Op.cit. Hlm.2 30
- Mahmudi, (2013), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Mardeli, Iis. *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2015, 1-29.
- Mariet K. Goo, Herny Sunarya, Maryono, 2021. “*Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apdes), Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2018-2020)*”, Jurnal Akuntansi (JA) Vol.8 No.3, 2021. Diakses tanggal 19 Februari 2024 dari <https://ejournal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/608>.
- Nurcholis, Hanif., *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Erlangga, 2011). Hlm. 73.
- Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*
- Rahma Gusmawati Tammu, 2022 “*Analisis Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 di Desa Lembang Burasia Kecamatan Bittuang Tana Toraja*”. Diakses pada tanggal 6 Januari 2024 dari <https://jurnal.adptersi.or.id/index.php/jma>
- Rincian Dana Desa 2024 Ngada. Diakses tanggal 11 Februari 2024 dari <https://rakyatbengkulu.diksway.id/amp/664109/rincian-dana-desa-2024-ngada-ntt-cek-jawabannya-di-sini/160>
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 245.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2022), 85-89.
- Utami Cindy A. (2019). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Studi di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*. Diakses pada tanggal 11 Februari 2024 dari <https://repository.uir.ac.id/3523/1/bab1.pdf>